



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja serta perubahan komposisi BOS Reguler untuk Satdikdas Negeri dalam Kabupaten Pidie perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBK Pidie, pergeseran anggaran antar kelompok belanja sebagaimana telah mendapat persetujuan DPRK Pidie Nomor: 172/359/2019 perihal Persetujuan penganggaran Dana Hibah Rehab dan Rekon TA. 2019, Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja TA 2019, dan Pergeseran Anggaran antar Kelompok Belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana telah mendapat persetujuan Kepala SKPKD Kabupaten Pidie Nomor: 916/004/PPKD/2019 perihal Persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa apabila penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan yang telah dicantumkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

De

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
26. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

no

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
31. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 2.250.070.103.286,00,- bertambah sejumlah Rp 108.597.123.911,56,- sehingga menjadi Rp 2.358.667.227.197,56,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 2.216.416.510.959,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp (17.700.513.084,96),-
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.198.715.997.874,04,-
2. Belanja
 - a. Semula Rp 2.250.070.103.286,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 108.597.123.911,56,-
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2.358.667.227.197,56,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (159.951.229.323,52),-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 33.653.592.327,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 126.297.636.996,52,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 159.951.229.323,52,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 159.951.229.323,52,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,-

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 17 Desember 2019 M

20 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di Sigli

Pada Tanggal 17 Desember 2019 M

20 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 41

KABUPATEN PIDIE
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 1

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 2.216.416.510.959,00 | 2.198.715.997.874,04 | (17.700.513.084,96) | (0,80) |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 282.214.740.586,00 | 280.531.807.650,04 | (1.682.932.935,96) | (0,60) |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 17.147.260.751,00 | 17.147.260.751,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 7.399.861.700,00 | 7.399.861.700,00 | 0,00 | - |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.101.301.121,00 | 3.101.301.121,00 | 0,00 | - |
| 1.1.4 | Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah | 7.345.479.258,00 | 7.345.479.258,00 | 0,00 | - |
| 1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 247.220.837.756,00 | 245.537.904.820,04 | (1.682.932.935,96) | (0,68) |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1.132.399.001.764,00 | 1.107.580.297.802,00 | (24.818.703.962,00) | (2,19) |
| 1.2.1 | Transfer Umum | 843.828.145.764,00 | 844.297.668.000,00 | 469.522.236,00 | 0,06 |
| 1.2.2 | Transfer Khusus | 288.570.856.000,00 | 263.282.629.802,00 | (25.288.226.198,00) | (8,76) |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 801.802.768.609,00 | 810.603.892.422,00 | 8.801.123.813,00 | 1,10 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 42.792.678.241,00 | 55.101.117.300,00 | 12.308.439.059,00 | 28,76 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | 42.807.777.510,00 | 42.807.777.510,00 | 0,00 | - |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian | 525.951.016.000,00 | 524.655.511.065,00 | (1.295.504.935,00) | (0,25) |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 190.251.296.858,00 | 188.039.486.547,00 | (2.211.810.311,00) | (1,16) |
| 1.3.6 | Pendapatan Lain-lain daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.7 | Bantuan Dana Kontigensi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.216.416.510.959,00 | 2.198.715.997.874,04 | (17.700.513.084,96) | (0,80) |
| 2 | BELANJA DAERAH | 2.250.070.103.286,00 | 2.358.667.227.197,56 | 108.597.123.911,56 | 4,83 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.350.472.949.751,00 | 1.376.695.268.294,00 | 26.222.318.543,00 | 1,94 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 707.845.641.447,00 | 723.264.950.763,00 | 15.419.309.316,00 | 2,18 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 7.383.000.000,00 | 7.808.000.000,00 | 425.000.000,00 | 5,76 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 12.206.479.258,00 | 19.584.488.485,00 | 7.378.009.227,00 | 60,44 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 2.446.498.470,00 | 2.446.498.470,00 | 0,00 | - |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol | 615.441.330.576,00 | 615.441.330.576,00 | 0,00 | - |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 60,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 899.597.153.535,00 | 981.971.958.903,56 | 82.374.805.368,56 | 9,16 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 139.878.342.848,00 | 164.730.003.960,00 | 24.851.661.112,00 | 17,77 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 441.050.878.462,00 | 466.422.434.263,56 | 25.371.555.801,56 | 5,75 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 318.667.932.225,00 | 350.819.520.680,00 | 32.151.588.455,00 | 10,09 |
| | JUMLAH BELANJA | 2.250.070.103.286,00 | 2.358.667.227.197,56 | 108.597.123.911,56 | 4,83 |
| | SURPLUS(DEFISIT) | (33.653.592.327,00) | (159.951.229.323,52) | (126.297.636.996,52) | 375,29 |

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 33.653.592.327,00 | 159.951.229.323,52 | 126.297.636.996,52 | 375,29 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 33.653.592.327,00 | 159.951.229.323,52 | 126.297.636.996,52 | 375,29 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.7 | Penerimaan kembali investasi dana bergulir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 33.653.592.327,00 | 159.951.229.323,52 | 126.297.636.996,52 | 375,29 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 33.653.592.327,00 | 159.951.229.323,52 | 126.297.636.996,52 | 375,29 |
| 3.3 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Sigli, Desember 2019

BUPATI PIDIE,

ZEPHONY ANIMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

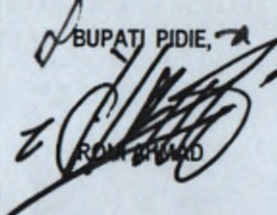
Organisasi : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 - Dinas Pendidikan

Halaman : 4

| Kode Rekening | Uraian | APBKP 2019 | Perubahan APBKP 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 42.815.195.759 | 50.718.884.818 | 7.903.689.059 | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 42.815.195.759 | 50.718.884.818 | 7.903.689.059 | |
| 1.01.1.01.01.16 1.01.1.01.01.16.63 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP | 42.815.195.759 | 50.718.884.818 | 7.903.689.059 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 8.128.893.488 | 8.028.848.600 | (100.044.888) | |
| 5.2.1.04 5.2.1.04.01 | Honorarium Pengelola Dana BOS Honorarium Pengelola Dana BOS | 8.128.893.488 8.128.893.488 | 8.028.848.600 8.028.848.600 | (100.044.888) (100.044.888) | Belanja Pegawai (Bos reguler) 8.028.848.600 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.775.450.551 | 27.038.860.215 | 263.409.664 | |
| 5.2.2.22 5.2.2.22.01 | Belanja Barang Dana BOS Belanja Barang Dana BOS | 26.775.450.551 26.775.450.551 | 27.038.860.215 27.038.860.215 | 263.409.664 263.409.664 | Belanja Barang dan Jasa (Bos reguler) 27.029.174.215 Belanja Barang dan Jasa (Bos afirmasi dan kinerja) 9.686.000 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 7.910.851.720 | 15.651.176.003 | 7.740.324.283 | |
| 5.2.3.37 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah | 7.910.851.720 | 15.651.176.003 | 7.740.324.283 | |

| Kode Rekening | Uraian | APBKP 2019 | Perubahan APBKP 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.3.37.13 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain | 7.910.851.720 | 15.651.176.003 | 7.740.324.283 | - Belanja Modal (Bos reguler) 4.231.862.003 - Belanja Modal (Bos afirmasi dan kinerja) 11.419.314.000 |
| | JUMLAH BELANJA | 42.815.195.759 | 50.718.884.818 | 7.903.689.059 | |

BUPATI PIDIE,

 ROMO AHMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

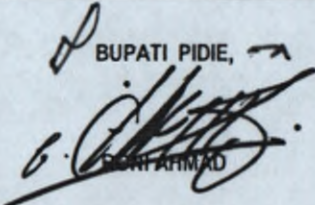
Organisasi : 1.01.04 - Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten

Sub Unit Organisasi : 1.01.04.01 - Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten

Halaman : 6

| Kode Rekening | Uraian | APBKP 2019 | Perubahan APBKP 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 564.849.531 | 564.849.531 | 0 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 564.849.531 | 564.849.531 | 0 | |
| 1.02.1.02.03.00.00 | Non Kegiatan | 564.849.531 | 564.849.531 | 0 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 564.849.531 | 564.849.531 | - | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 564.849.531 | 564.849.531 | 0 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 436.632.230 | 436.501.090 | (131.140) | |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 48.082.541 | 48.082.541 | - | |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 39.523.000 | 39.523.000 | - | |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 11.266.500 | 11.295.000 | 28.500 | |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 24.972.227 | 24.972.227 | - | |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 759.396 | 862.036 | 102.640 | |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 4.711 | 4.711 | - | |
| 5.1.1.01.24 | Jaminan Keselamatan Kerja | 902.235 | 902.235 | - | |
| 5.1.1.01.25 | Jaminan Kematian | 2.706.691 | 2.706.691 | - | |
| | JUMLAH BELANJA | 564.849.531 | 564.849.531 | - | |

BUPATI PIDIE,



ARMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2019

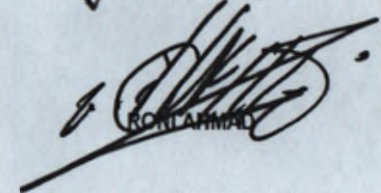
Urusan Pemerintahan : 3.03 - Urusan Pilihan Pertanian
 Organisasi : 3.03.01 - Dinas Pertanian dan Pangan
 Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 - Dinas Pertanian dan Pangan

Halaman : 7

| Kode Rekening | Uraian | APBK 2019 | Perubahan APBK 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 12.661.089.905 | 12.661.089.905 | 0 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 12.657.889.905 | 12.482.389.905 | -175.500.000 | |
| 3.03.3.03.01.00.00 | Non Kegiatan | 12.657.889.905 | 12.482.389.905 | -175.500.000 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 12.657.889.905 | 12.482.389.905 | (175.500.000) | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 12.657.889.905 | 12.482.389.905 | -175.500.000 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 12.657.889.905 | 12.482.389.905 | (175.500.000) | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 3.200.000 | 178.700.000 | 175.500.000 | |
| 3.03.3.03.01.19 | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | | | | |
| 3.03.3.03.01.19.02 | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | 0 | 98.000.000 | 98.000.000 | |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | - | 98.000.000 | 98.000.000 | |
| 5.2.2.27 | Belanja Bantuan Sosial Barang | 0 | 98.000.000 | 98.000.000 | |
| 5.2.2.27.01 | Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | 0 | 98.000.000 | 98.000.000 | |
| | 3. Pengadaan Bibit Bawang Merah Klp. Tani Baru Tabina Gp. Lampeudeu Tunong, Kec. Pidie | - | - | - | 49.000.000 |
| | 17. Pengadaan Bibit Alpokot dalam Kab. Pidie | - | - | - | 49.000.000 |
| | | | | | 3. Pengadaan Bibit Bawang Merah Klp. Tani Baru Tabina Gp. Lampeudeu Tunong, Kec. Pidie |
| | | | | | 17. Pengadaan Bibit Alpokot dalam Kab. Pidie |

| Kode Rekening | Uraian | APBKP 2019 | Perubahan APBKP 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.03.3.03.01.22 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | | | | |
| 3.03.3.03.01.22.02 | Pembibitan dan perawatan ternak | 3.200.000 | 80.700.000 | 77.500.000 | |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000 | 80.700.000 | 77.500.000 | |
| 5.2.2.27 | Belanja Bantuan Sosial Barang | 3.200.000 | 80.700.000 | 77.500.000 | |
| 5.2.2.27.01 | Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | 3.200.000 | 80.700.000 | 77.500.000 | |
| | 66. Pengadaan Ternak Lembu Gp. Balee Pineung Kec.Pkn Baro | | | | 66. Pengadaan Ternak Lembu Gp. Balee Pineung Kec. Peukan Baro 77.500.000 |
| | 68. Perencanaan Kandang Sapi Gp. Masjid Gogo Kec. P.Tiji 3.200.000 | | | | 68. Pengawasan Kandang Sapi Gp. Masjid Gogo Kec. Padang Tiji 3.200.000 |
| | JUMLAH BELANJA | 12.661.089.905 | 12.661.089.905 | - | |

BUPATI PIDIE,



RONT ANIMAL

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01.01 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

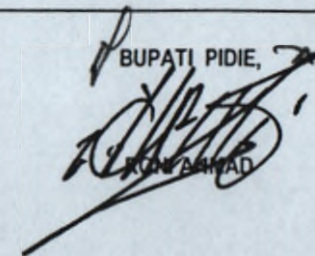
Halaman : 9

| Kode Rekening | Uraian | APBK 2018 | Perubahan APBK 2018 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 16.708.741.850 | 16.708.741.850 | 0 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 16.708.741.850 | 16.708.741.850 | 0 | |
| 1.02.1.02.03.00.00 | Non Kegiatan | 16.708.741.850 | 16.708.741.850 | 0 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 16.708.741.850 | 16.708.741.850 | - | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 11.668.741.850 | 11.668.741.850 | 0 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 892.290.000 | 890.085.000 | (2.205.000) | - Ketua 1 org x 11 bln 23.100.000 - Wakil Ketua 2 org x 11 bln 36.960.000 - Anggota 37 org x 14 bln 815.850.000 - Anggota 3 org x 3 bln 14.175.000 |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 124.920.600 | 97.238.455 | (27.682.145) | Tunjangan Istri - Ketua 1 org x 11 bln x Rp.2.100.000 x 10 % 2.310.000 - Wakil Ketua 2 org x 11 bln x Rp.1.680.000 x 10 % 3.696.000 - Anggota 60.795.000 Tunjangan Anak - Ketua 2 org x 11 bln Rp 2.100.000 x 2 % 924.000 - Wakil Ketua 4 org x 11 bln x Rp.1.680.000 x 2 % 1.478.400 - Anggota 28.035.055 |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 1.293.820.500 | 1.290.623.250 | (3.197.250) | Tunjangan Jabatan - Ketua 1 org x 11 bln 33.495.000 - Wakil Ketua 2 org x 11 bln 53.592.000 - Anggota 37 ogr x 14 bln 1.182.982.500 |

| Kode Rekening | Uraian | APBK 2018 | Perubahan APBK 2018 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 139.046.400 | 107.978.220 | (31.068.180) | - Anggota 3 org x 3 bln 20.553.750 - Tunjangan Beras 160 Jiwa x 12 bln 107.978.220 |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 30.639.000 | 30.313.500 | (325.500) | - Ketua 1 org x 11 bln 1.039.500 - Wakil Ketua 2 org x 11 bln 1.870.000 - Anggota 37 org x 14 bln 26.936.000 - Anggota 3 org x 3 bln 468.000 |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 27.500 | 27.500 | - | |
| 5.1.1.01.10 | Uang Paket | 89.229.000 | 89.008.500 | (220.500) | - Ketua 1 org x 11 bln 2.310.000 - Wakil Ketua 2 org x 11 bln 3.696.000 - Anggota 37 org x 14 bln 81.585.000 - Anggota 3 org x 3 bln 1.417.500 |
| 5.1.1.01.11 | Tunjangan Panitia Musyawarah | 32.185.650 | 24.953.775 | (7.231.875) | - Ketua 1 org x 11 bln 2.512.125 - Wakil Ketua 2 org x 11 bln 3.349.500 - Sekretaris 1 org x 9 bln 1.096.200 - Anggota 17.995.950 |
| 5.1.1.01.12 | Tunjangan Komisi | 63.305.550 | 49.740.075 | (13.565.475) | Tunjangan Komisi - Ketua 5 org x 11 bln 12.560.625 - Wakil Ketua 5 org x 11 bln 8.373.750 - Sekretaris 5 org x 11 bln 6.699.000 - Anggota 22 org x 11 bln 22.106.700 |
| 5.1.1.01.13 | Tunjangan Panitia Anggaran | 32.185.650 | 24.953.775 | (7.231.875) | Tunjangan Panitia Anggaran - Ketua 1 org x 11 bln 2.512.125 - Wakil Ketua 2 org x 11 bln 3.349.500 - Sekretaris 1 org x 9 bln 1.096.200 - Anggota 17.995.950 |

| Kode Rekening | Uraian | APBK 2018 | Perubahan APBK 2018 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.1.01.14 | Tunjangan Badan Kehormatan | 10.870.650 | 8.297.625 | (2.573.025) | Tunjangan Badan Kehormatan - Ketua 1 org x 11 bln 2.512.125 - Wakil Ketua 1 org x 11 bln 1.674.750 - Sekretaris 1 org x 9 bln 1.096.200 - Anggota 3 org x 11 bln 3.014.550 |
| 5.1.1.01.15 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 14.707.350 | 12.712.175 | (1.995.175) | Tunjangan Badan Legislasi - Ketua 1 org x 11 bln 2.512.125 - Wakil Ketua 3.074.750 - Sekretaris 1 org x 9 bln 1.096.200 - Anggota 6 org x 11 bln 6.029.100 |
| 5.1.1.01.16 | Tunjangan Perumahan | 2.364.000.000 | 2.373.000.000 | 9.000.000 | Tunjangan Perumahan - Wakil Ketua 2 org x 9 bln 108.000.000 - Anggota 2.265.000.000 |
| 5.1.1.01.18 | Uang Jasa Pengabdian | 382.410.000 | 369.810.000 | (12.600.000) | Uang Jasa Pengabdian - Ketua 1 org x 6 kali 12.600.000 - Wakil Ketua 2 org x 6 Kali 20.160.000 - Anggota 337.050.000 |
| 5.1.1.01.24 | Jaminan Keselamatan Kerja | 13.824.000 | 0 | (13.824.000) | |
| 5.1.1.01.25 | Jaminan Kematian | 17.280.000 | 0 | (17.280.000) | |
| 5.1.1.01.26 | Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD | 840.000.000 | 840.000.000 | - | Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK - Ketua 1 org x 5 kali x 2 Kegiatan 21.000.000 - Wakil Ketua 2 org x 5 kali x 2 Kegiatan 42.000.000 - Anggota 37 org x 5 kali x 2 Kegiatan 777.000.000 |
| 5.1.1.01.27 | Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.328.000.000 | 5.460.000.000 | 132.000.000 | Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK - Anggota 5.460.000.000 |
| 5.1.1.03 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | <u>5.040.000.000</u> | <u>5.040.000.000</u> | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | APBK 2018 | Perubahan APBK 2018 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.1.03.01 | Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.040.000.000 | 5.040.000.000 | - | <ul style="list-style-type: none"> - Ketua 1 org x 5 kali x 9 bln 94.500.000 - Wakil Ketua 2 org x 5 kali x 9 bln 189.000.000 - Anggota 37 org x 5 kali x 12 bln 4.756.500.000 |
| | JUMLAH BELANJA | 16.708.741.850 | 16.708.741.850 | - | |

BUPATI PIDIE,

 RONI AHMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01.03 - Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.03.01 - Sekretariat Daerah

Halaman : 13

| Kode Rekening | Uraian | APBK 2019 | Perubahan APBK 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 10.871.304.334 | 10.871.304.334 | 0 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 10.871.304.334 | 10.871.304.334 | 0 | |
| | Non Kegiatan | 10.871.304.334 | 10.871.304.334 | 0 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 10.871.304.334 | 10.871.304.334 | - | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 10.871.304.334 | 10.871.304.334 | 0 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 8.736.140.504 | 8.714.501.780 | (21.638.724) | |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 795.636.072 | 795.636.072 | - | |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 570.009.000 | 590.030.000 | 20.021.000 | |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 270.094.563 | 270.094.563 | - | |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 430.433.702 | 430.433.702 | - | |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 9.976.873 | 11.594.597 | 1.617.724 | |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 110.677 | 110.677 | - | |
| 5.1.1.01.24 | Jaminan Keselamatan Kerja | 14.725.755 | 14.725.755 | - | |
| 5.1.1.01.25 | Jaminan Kematian | 44.177.188 | 44.177.188 | - | |
| | JUMLAH BELANJA | 10.871.304.334 | 10.871.304.334 | - | |

BUPATI PIDIE,

FRANSISKA

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01.19 - Kecamatan Mutiara

Sub Unit Organisasi : 4.01.19.01 - Kecamatan Mutiara

Halaman : 14

| Kode Rekening | Uraian | APBKP 2019 | Perubahan APBKP 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.745.849.398 | 1.745.849.398 | 0 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.745.849.398 | 1.745.849.398 | 0 | |
| | Non Kegiatan | 1.745.849.398 | 1.745.849.398 | 0 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 1.745.849.398 | 1.745.849.398 | - | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.745.849.398 | 1.745.849.398 | 0 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.356.261.540 | 1.355.940.059 | (321.481) | |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 159.208.518 | 159.208.518 | - | |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 78.793.500 | 79.100.000 | 306.500 | |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 52.689.000 | 52.689.000 | - | |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 87.637.253 | 87.637.253 | - | |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 123.824 | 138.805 | 14.981 | |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 24.992 | 24.992 | - | |
| 5.1.1.01.24 | Jaminan Keselamatan Kerja | 2.777.714 | 2.777.714 | - | |
| 5.1.1.01.25 | Jaminan Kematian | 8.333.057 | 8.333.057 | - | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.745.849.398 | 1.745.849.398 | - | |

BUPATI PIDIE,

SANI AHMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2019

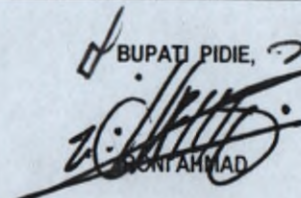
Urusan Pemerintahan : 4.01 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01.32 - Kecamatan Titeue

Sub Unit Organisasi : 4.01.32.01 - Kecamatan Titeue

Halaman : 15

| Kode Rekening | Uraian | APBKP 2019 | Perubahan APBKP 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 878.454.812 | 878.454.812 | 0 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 878.454.812 | 878.454.812 | 0 | |
| | Non Kegiatan | 878.454.812 | 878.454.812 | 0 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 878.454.812 | 878.454.812 | - | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 878.454.812 | 878.454.812 | 0 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 672.059.648 | 672.058.790 | (858) | |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 65.776.762 | 65.776.762 | - | |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 85.692.000 | 85.692.000 | - | |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 13.142.250 | 13.142.250 | - | |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 36.065.160 | 36.065.160 | - | |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 151.408 | 152.266 | 858 | |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 12.546 | 12.546 | - | |
| 5.1.1.01.24 | Jaminan Keselamatan Kerja | 1.388.741 | 1.388.741 | - | |
| 5.1.1.01.25 | Jaminan Kematian | 4.166.297 | 4.166.297 | - | |
| | JUMLAH BELANJA | 878.454.812 | 878.454.812 | - | |

BUPATI PIDIE,

 SONT AHMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2019

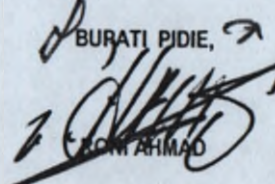
Urusan Pemerintahan : 4.01 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.03.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman : 16

| Kode Rekening | Uraian | APBKP 2019 | Perubahan APBKP 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 3.046.037.273 | 3.046.037.273 | 0 | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.046.037.273 | 3.046.037.273 | 0 | |
| | Non Kegiatan | 3.046.037.273 | 3.046.037.273 | 0 | |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 3.046.037.273 | 3.046.037.273 | - | |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.046.037.273 | 3.046.037.273 | 0 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.381.086.268 | 2.380.956.440 | (129.828) | |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 235.691.367 | 235.691.367 | - | |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 213.927.375 | 213.927.375 | - | |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 70.554.250 | 70.554.250 | - | |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 123.881.652 | 123.881.652 | - | |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 1.174.260 | 1.304.088 | 129.828 | |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 40.492 | 40.492 | - | |
| 5.1.1.01.24 | Jaminan Keselamatan Kerja | 4.920.421 | 4.920.421 | - | |
| 5.1.1.01.25 | Jaminan Kematian | 14.761.188 | 14.761.188 | - | |
| | JUMLAH BELANJA | 3.046.037.273 | 3.046.037.273 | - | |

BUPATI PIDIE,

B. CAH AHMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.04 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

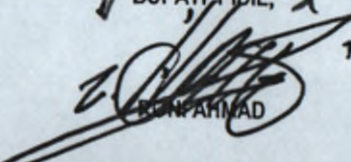
Organisasi : 4.04.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (PPKD)

Halaman : 17

| Kode Rekening | Uraian | APBKP 2019 | Perubahan APBKP 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 42.792.678.241 | 50.696.367.300 | 7.903.689.059 | |
| 4.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 42.792.678.241 | 50.696.367.300 | 7.903.689.059 | |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 42.792.678.241 | 50.696.367.300 | 7.903.689.059 | |
| 4.3.1.06 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 42.792.678.241 | 50.696.367.300 | 7.903.689.059 | |
| 4.3.1.06.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 42.792.678.241 | 50.696.367.300 | 7.903.689.059 | Dana BOS |
| | | | | | - Dana BOS reguler 39.267.367.300 |
| | | | | | - Dana BOS afirmasi dan kinerja 11.429.000.000 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 42.792.678.241 | 50.696.367.300 | 7.903.689.059 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| | JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | |

| Kode Rekening | Uraian | APBKP 2019 | Perubahan APBKP 2019 | Bertambah (Berkurang) | Penjelasan |
|---------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | - | - | - | |

BUPATI PIDIE,

 RON FAHMAD